

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO. 81A TAHUN 2013 TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DI SD NEGERI LAWE BEKUNG KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

TESIS

OLEH

**JULIANTO
NPM. 181801044**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO. 81A TAHUN 2013 TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DI SD NEGERI LAWE BEKUNG KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**JULIANTO
NPM. 181801044**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Nama : Julianto

NPM : 181801044



Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heri Kusmanto', is written over the watermark. Below the signature is a horizontal line.

Dr. Heri Kusmanto, MA

Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Abd. Kadir M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

Telah diuji pada Tanggal 13 November 2020

Nama : Julianto

NPM : 181801044



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salariah Siregar, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 13 November 2020

Yang menyatakan,



Julianto

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 81A TAHUN 2013 TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD NEGERI LAWE BEKUNG KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nama : Julianto
NPM : 181801044
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Kebijakan kurikulum 2013 ditujukan dalam upaya perbaikan kurikulum sebelumnya. Beberapa program persiapan sudah dilakukan pemerintah, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengimplementasikan. Hal itulah yang akan di terapkan di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana Implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara? (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kurikulum 2013 dalam peningkatan standar pendidikan di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara? Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasi kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut (1) Materi yang digunakan dalam pembelajaran telah sesuai dengan KTSP, meskipun tidak semua digunakan dan ada kebijakan untuk penyempurnaan kurikulum yang digunakan. Standar sasaran kebijakan memfokuskan kajian pada perencanaan, pelaksanaan, dan Implementasi terhadap pengembangan Implementasi kurikulum 2013. Sikap para pelaksana telah memperhatikan prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, dan prinsip yang berorientasi pada tujuan. (2) Kendala pelaksanaan kurikulum 2013 seperti pengadaan sarana pembelajaran dan sumber belajar untuk peserta didik. Tidak adanya buku pegangan guru untuk melaksanakan pembelajaran atau materi yang akan di sampaikan. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan mutu pendidikan. Guru diharapkan mampu meningkatkan terhadap penguasaan kompetensi sebagai pembelajaran kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013, di SD

UNIVERSITAS MEDAN AREA
SD Negeri Lawe Bekung.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE NO. 81A OF 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 AT SD NEGERI LAWE BEKUNG BADAR DISTRICT SOUTHEAST ACEH REGENCY

Name : Julianto
NPM : 181801044
Study Program : Master of Science Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Adam, M.AP

Curriculum policy 2013 is aimed at improving the previous curriculum. Some preparation programs have been carried out by the government, but there are still some constraints so that not all teachers have adequate competencies to implement. This is what will be applied in SD Negeri Lawe Bekung Badar Subdistrict, Southeast Aceh Regency. Maka problem formulation is (1) Bagaimana kurikulum implementation in 2013 in improving education standards at SD Negeri LaweBekungBadar District, Southeast Aceh Regency? (2) What factors are the constraints of the implementation of the 2013 curriculum at SD Negeri Lawe Bekung District Badar, Southeast Aceh Regency? The purpose of this research is to implement the 2013 curriculum at SD Negeri LaweBekung, Badar Subdistrict, Southeast Aceh Regency. The research method used is descriptive with qualitative analysis. Data collection is obtained from interviews, documentation, and observations. With the results of the following research (1) The materials used in learning are in accordance with the KTSP, although not all are used and there are policies for curriculum improvement used. Standard policy target memfokuskan kajian pada perencanaan, pelaksanaan, dan Implementasi terhadap pengembangan kurikulum implementation 2013. The attitude of the executives has been memperhatikan prinsip relevansi, the principle of effectiveness, the principle of efficiency, continuity, flexibility, and goal-oriented principles. (2) Constraints on the implementation of the 2013 curriculum such as the procurement of learning facilities and learning resources for learners. There is no teacher handbook to carry out the learning or materials that will be conveyed. The advice of this research is to improve the quality of education. Guru is expected to be able to improve the ability of competence as learning pedagogical competencies, personality competencies, social competencies, and professional competencies.

Keywords : Implementation, Regulation of the Minister of Education and Culture No. 81a year 2013 Tentang Curriculum Implementation 2013, at
UNIVERSITAS MEDAN AREA
SD Negeri Lawe Bekung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini untuk melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Adam, M.AP sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayah Saeran dan Ibu Rudiah yang sangat saya sayangi. Juga buat Bapak dan Ibu Mertua saya, Bapak Salidin Husein dan Ibu Jusmaniar yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Kepada Istri saya tercinta, Yosi Mandasari terima kasih atas do'a, dukungan, baik

moril dan materil serta kasih sayang yang telah di berikan. Dan kepada anak-anak saya tersayang, Alifia Alwafiq Bidadari, Zalva Zauja Marwah, dan Mikhaila Latifah Qotrunnada yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun. Kepada abang we dan adik-adik saya tersayang, terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Nopember 2020

Peneliti



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik.....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	11
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.2 Teori Implementasi	16
2.3 Standar Pendidikan	22
2.4 Konsep Standar Pendidikan.....	23
2.4.1. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan	24
2.4.2. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah.....	24
2.4.3. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah	25
2.5 Permendikbud	25
2.5.1. Karakteristik Kurikulum.....	26
2.5.1.1 Pendekatan Saintifik.....	28
2.5.1.2 Penilaian Autentik.....	34
2.5.1.3 Penilaian Kinerja	36
2.5.1.4 Penilaian Proyek.....	38
2.5.1.5 Penilaian Portofolio.....	38
2.5.1.6 Penilaian Tertulis.....	39
2.5.2. Tujuan Kurikulum 2013	39

2.5.3. Elemen Perubahan Kurikulum 2013.....	40
2.5.4. Buku Ajar Kurikulum 2013	42
2.6 Kerangka Pemikiran	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	48
3.3 Informan Penelitian	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Analisis Data	50
3.5.1. Reduksi Data.....	50
3.5.2. Penyajian Data	50
3.5.3. Verifikasi	51
3.6 Definisi Konsep dan Operasional	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi.....	53
4.2 Gambaran Umum SD Negeri Lawe Bekung	53
4.2.1. Keadaan Tenaga Pendidik	54
4.2.2. Keadaan Siswa SD Negeri Lawe Bekung	56
4.2.3. Struktur Organisasi	56
4.2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah.....	59
4.2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Sekolah	59
4.2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Perpustakaan	60
4.2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Penjaga Sekolah.....	60
4.2.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Guru	60
4.3 Implementasi Kurikulum 2013	61
4.4 Implementasi Permendikbud	73
4.5 Kendala Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	----

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Status Tenaga Pendidik SD Negeri Lawe Bekung	54
Tabel 1.2 Status Tenaga Kependidikan SD Negeri Lawe Bekung	55
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik SD Negeri Lawe Bekung	55
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Tenaga Kependidikan SD Negeri Lawe	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan Santifik Dalam Pembelajaran.....	30
Gambar 1.2 Skema Kerangka Konseptual	47
Gambar 1.3 Struktur Organisasi SD Negeri Lawe Bekung.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mutu pendidikan merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan martabat atau kemajuan suatu Bangsa. Mencermati mutu pendidikan suatu Bangsa atau Negara, seseorang akan dapat memperkirakan peringkat Negara tersebut di antara Negara-Negara di dunia. Oleh karena itu, Bangsa yang maju akan selalu menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikannya dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, menyelenggarakan berbagai lomba dalam berbagai aspek pendidikan, atau mengirimkan para tunas Bangsa untuk menimba ilmu di Negara lain.

Beragam upaya dilakukan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keyakinan bahwa Bangsa yang mengabaikan pendidikan menjadi Bangsa yang tertinggal yang akan kalah bersaing dengan Bangsa-Bangsa lain. Hal ini terdapat beberapa fungsi yang ingin di capai, yaitu untuk menguatkan dan memperdalam teori yang ada, memunculkan teori baru, serta untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mengenai kurikulum, memberikan gambaran tentang kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum, memberikan gambaran tentang kualitas kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui

kurikulum, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum (Mulyasa, 2013: 88).

Dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mengalami penyempurnaan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penataan pola pikir dan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban. Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik-integratif.

Dari karakteristik dapat dilihat bahwa Kurikulum 2013 lebih mengedepankan perubahan perilaku, sikap dan moral siswa meskipun tidak memungkiri adanya perubahan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Perubahan kompetensi tersebut dapat terjadi melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian. Kurikulum 2013 di kenal dengan sebutan kurikulum tematik integratif, dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Dari pendekatan dan penilaian inilah yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana perubahan kompetensi siswa dapat tercapai.

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan). Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Lebih lanjut Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang cerdas dalam berbagai aspek baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, serta memiliki sikap dan perilaku mulia yang berguna bagi kepentingan dirinya dan masyarakat. Sehingga dapat berpengaruh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, Pemerintah menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai proses peningkatan sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah, mulai dari perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi pelajaran serta evaluasi tenaga pendidik pun telah dilakukan.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan guna meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang berupa aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hilda Karli (2014: 84) menyatakan bahwa kurikulum sebagai rencana untuk pengalaman belajar siswa di sekolah mencapai tujuan pendidikan dan menjamin adanya keseimbangan antara proses pendidikan dan pemakai lulusan. Oleh karena itu kurikulum disusun sesuai zamannya. Inti dari kurikulum ada pada upaya penyederhanaan dan tematik-integratif yang merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tujuan kurikulum ini disiapkan adalah untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan.

Implementasi kurikulum menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah untuk mengkaji dan memahami Standar Nasional Pendidikan, serta menerapkannya dalam pembelajaran. Disisi lain, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Seperti

halnya yang disampaikan Faridah Alawiyah (2014: 9), kebijakan kurikulum 2013

ditujukan dalam upaya perbaikan kurikulum sebelumnya. Memasuki tahun pelajaran baru 2014/2015, implementasi kurikulum ini masih menghadapi satu kendala besar yang harus segera ditangani, yaitu persoalan kesiapan guru sebagai kunci keberhasilan implementasinya. Beberapa program persiapan sudah dilakukan pemerintah, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengimplementasikan suatu kurikulum.

SD Negeri Lawe Bekung merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Pada sekolah ini juga diwajibkan untuk menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Permendikbud no 81a. Dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara pada saat rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2019 yaitu: Belum semua Guru mampu melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar, ketiadaan buku referensi bagi guru maupun siswa di sekolah juga menjadi permasalahan besar, selain itu ketidaklayakan sejumlah peralatan penunjang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 yang masih memiliki kekurangan, membuat sejumlah guru lebih nyaman menggunakan Kurikulum 2006.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian

tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Permendikbud No. 81a di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Permendikbud No. 81a di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Permendikbud No. 81a di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk menganalisis kendala implementasi Permendikbud No. 81a di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan umumnya dibidang ilmu pendidikan dan ilmu administrasi publik, serta mengukur sejauh mana pelaksanaan kurikulum 2013. Dan mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki seorang guru dalam kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013 dalam mutu pendidikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

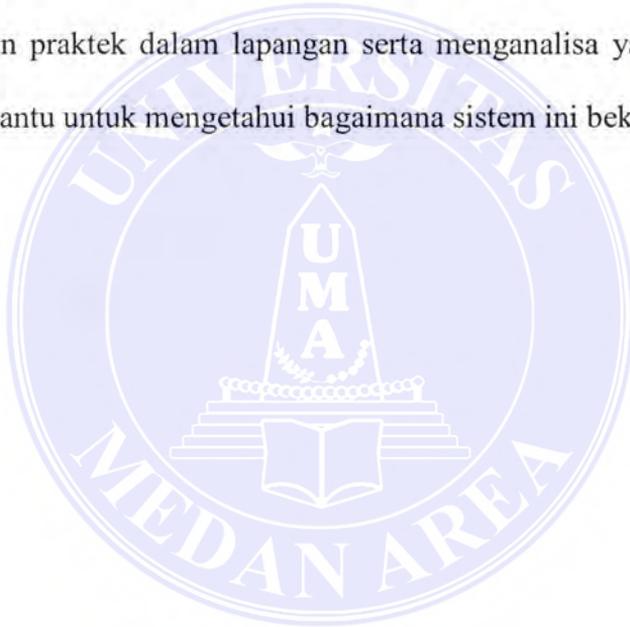
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 21/8/23

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Guru-Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengenai pemahaman tentang kurikulum 2013 dan penerapan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu memberikan wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem ini bekerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu Negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh Pemerintah termasuk kebijakan publik.

Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan Perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat Pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan Pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

d. Implementasi kebijakan

e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

1. Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin dia plikasikan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternative kebijakan yang di tawarkan. Kriteria yang dapat di pergunakan antara lain criteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat.
6. Penilaian alternatif. Penilaian alternative dilakukan dengan menggunakan criteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebihjauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternative dalam pencapaian tujuan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id)21/8/23

7. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternative kebijakan yang diperkirakan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti implementasi yaitu pelaksanaan dan penerapan. Implementasi berasal dari aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme dari suatu sistem. Menurut Hanifah Harsono, Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi Tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi dan pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Harsono (2002:67) Sedangkan implementasi menurut Solichin Abdul Wahab merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Solichin Abdul Wahab (1997:63)

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni di laksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan (2013:9) mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.” Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2013:132).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasika kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2014:158).12

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengancara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut

diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang/sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2011:194).

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisilingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.¹³

2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi sebagai keberhasilan suatu program.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu di sukung sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program (Subarsono, 2015:101). Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori Edward III dalam Subarsono (2012:90), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
 2. Sumber daya
 3. Struktur birokrasi
 4. Disposisi.
- 14 Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwamereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus merekalakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskankepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapatdiikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat.

Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya \ harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidajelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agarefektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni

kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.¹⁵

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Teori Implementasi

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performan sesuatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit di realisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (Sulaeman, 2008) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman

tentang maksud untuk dan suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (1974) menegaskan bahwa Sumberdaya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana nya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakup atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horn dalam Agustinus (2006) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan public biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebihdahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bias jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bias menyebabkan gagal nya implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi

Agar kebijakan public bias dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bias dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, Pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi keorganisasi lain, dan komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak.

Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan(*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi

kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2.3 Standar Pendidikan

Standar pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (E. Mulyasa, 2010). Standar pendidikan oleh satuan pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, <https://doi.org/10.24090/umj.v1i1.1823>

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id) 21/8/23

sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan. Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan arahan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, kalender pendidikan yang menunjukkan aktifitas sekolah secara rinci dengan periode semester, bulanan dan mingguan, struktur organisasi satuan pendidikan, pembagian tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, kode etik hubungan warga satuan pendidikan, dan biaya operasional satuan pendidikan.

Kata kunci pada pengelolaan pendidikan pada satuan sekolah yang merupakan unit terbawah adalah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah, sedangkan manajemen berbasis sekolah diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan semua sumber demi tercapainya kemandirian.

2.4 Konsep Standar Pendidikan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah.

2.4.1 Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Menurut Pasal 49 pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.

2.4.2 Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Menurut Pasal 60 Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program Wajib Belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi:

- a. Peningkatan mutu guru/dosen.
- b. Standarisasi pendidikan.
- c. Akreditasi pendidikan.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global.

Penemuan Standar Minimal (SPM) bidang pendidikan.

- f. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

2.4.3 Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 59-(1) Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan

bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. Wajib belajar.
- b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah.
- c. Penuntasan pemberantasan buta aksara.
- d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
- e. Peningkatan status guru sebagai profesi.
- f. Akreditasi pendidikan.
- g. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.
- h. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

2.5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013

Berdasarkan penjelasan Mendikbud pada tanggal Jakarta 26-28 Juni 2013,

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar amanah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2010-2014 yang mengarah pada pematapan pelaksanaan system pendidikan nasional, melalui penyediaan system pembelajaran, penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Dimana sasaran penyempurnaan kurikulum sekolah dasar sampai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 21/8/23

menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. Kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat di demonstrasikan pesertadidik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum lanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mengalami penyempurnaan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penataan pola pikir dan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban. Inti dari Kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik-integratif.

2.5.1 Karakteristik Kurikulum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud No. 67 Tahun 2013, Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingintahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 21/8/23

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah kemasyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran.
5. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensid asar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
6. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (*organisasi horizontal and vertikal*).

Dari karakteristik tersebut dapat di lihat bahwa Kurikulum 2013 lebih mengedepankan perubahan perilaku, sikap dan moral siswa meskipun tidak memungkiri adanya perubahan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Perubahan kompetensi tersebut dapat terjadi melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian. Kurikulum 2013 di kenal dengan sebutan kurikulum tematik

Integrasi dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Dari pendekatan

dan penilaian inilah yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana perubahan kompetensi siswa dapat tercapai.

2.5.1.1 Pendekatan Saintifik (*scientific*)

Metode atau pendekatan *scientific* pertama kali diperkenalkan ke ilmu pendidikan Amerika pada akhir abad ke-19, sebagai penekanan pada metode laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta-fakta ilmiah (Hudson Rudolph :2005). Metode *scientific* ini memiliki karakteristik “*doing science*”. Metode ini memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan memecah proses ke dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran (Maria Varelas and Michael Ford, 2008:31). Hal inilah yang menjadi dasar dari pengembangan Kurikulum 2013 di Indonesia. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Maksudnya adalah, pendekatan saintifik mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bias berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi

pembelajaran di arahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari

berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Dalam hal ini penerapan saintifik sangat bergantung pada peran atau bantuan guru, namun seiring bertambahnya tingkatan kemampuan, kedewasaan dan pendidikan siswa, peran atau bantuan guru tersebut harus semakin berkurang. Ini dilakukan agar siswa mampu berfikir kritis, mengkonstruksi, membangun dan membuat sketsa pengetahuannya sendiri secara maksimal. Kriteria dari pendekatan saintifik salah satunya adalah mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran dengan metode atau pendekatan saintifik sendiri meliputi:

- a. Berpusat pada siswa.
- b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep.
- c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dapat mengembangkan karakter siswa.

Dalam kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern, yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan *scientific*. Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan *scientific* sebagai pendekatan ataupun metode. Namun karakteristik dari pendekatan *scientific* tidak berbeda dengan metode *scientific (scientific method)*. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran Kurikulum 2013 meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jaringan untuk semua mata

pelajaran. Gambar 1.1 berikut adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

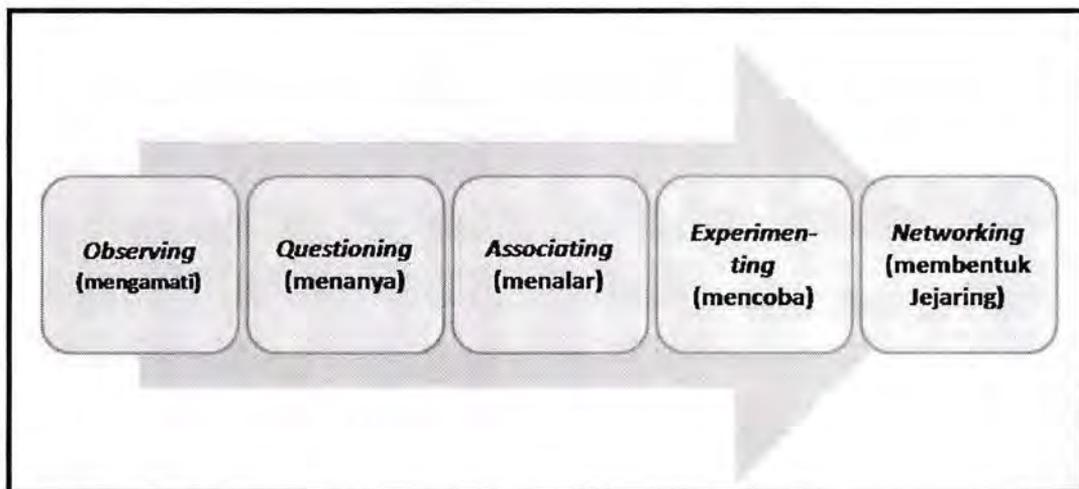
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Sumber: PPT Diklat Kemendikbud, 2013.

Dalam proses pembelajaran *scientific* merupakan perpaduan antara proses pembelajaran yang semula berfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, yang kemudian dilengkapi dengan adanya mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Meskipun ada yang mengembangkan pendekatan ini menjadi 7M (mengamati, menanya, mengelolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta). Hal ini tidaklah berpengaruh yang terpenting bahwa tujuan dari beberapa proses pembelajaran dalam pembelajaran *scientific* harus sama, yaitu menekankan bahwa belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat.

1. Mengamati(*Observing*)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahunya peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan “mengamati” dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud No. 81a, hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.

2. Menanya (*Questioning*)

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud No. 81a Tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang diharapkan dalam menanya adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingintahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Sedangkan Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindakan lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud No. 81a Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

3. Menalar (*Associating*)

Kegiatan “menalar” yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemauan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

4. Mencoba (*Experimenting*)

Mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau mencoba dilakukan melalui tiga tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tahap persiapan meliputi:

- a. Menetapkan tujuan eksperimen.
- b. Mempersiapkan alat atau bahan.
- c. Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah pesisw aserta alat atau bahan yang tersedia.
- d. Mempertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil resiko yang mungkin terjadi. (Buku Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013:208).

Tahap pelaksanaan meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Selama proses eksperimen, guru ikut membimbing dan mengamati proses percobaan.
- b. Selama proses eksperimen, guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan, termasuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan menghambat kegiatan pembelajaran.

Tahap tindak lanjut meliputi :

- a. Siswa mengumpulkan hasil eksperimen kepada guru
 - b. Guru memeriksa ahasil eksperimen siswa
 - c. Guru memberikan umpan balik kepada siswa atas hasil eksperimen
 - d. Guru dan siswa mendiskusikan masalah yang ditemukan sela eksperimen
 - e. Guru dan siswa memeriksa dan menyimpan kembali bahan dan alat yang digunakan.
5. Membuat Jejaring (*Networking*)

Pada pendekatan *scientific* guru diharapkan member kesempatan kepada pesertadidik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. “Mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud No. 81aTahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkanhasilan alisissecaralisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis,

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

2.5.1.2 Penilaian Autentik (*Authentic Assessment*)

Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik atau guru, satuan pendidikan dan Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran suatu kompetensi muatan pembelajaran, untuk penilaian oleh satuan pendidikan terdiri atas Ujian Tingkat Kompetensi (UTK) dan Ujian Sekolah (US). Sedangkan untuk penilaian oleh Pemerintah meliputi Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK) dan UTK atau Ujian Nasional (UN). Fungsinya untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian autentik merupakan pendekatan, prosedur, dan instrument penilaian proses dan capaian pembelajaran peserta didik dalam penerapan sikap spiritual dan sikap sosial, penguasaan pengetahuan, dan penguasaan keterampilan yang diperolehnya dalam bentuk pelaksanaan tugas perilakunya atau perilaku dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata, atau kemandirian belajar. Penilaian autentik dilakukan guru secara terus menerus (berkelanjutan) selama kegiatan pembelajaran. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA tuntutan Kurikulum 2013. Karena, asesmen semacam ini mampu menggambarkan

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan pesertadidik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Menurut Pierce dan O: Malley (2006) mengatakan bahwa asesmen autentik memiliki enam karakteristik yakni meliputi:

1. *Constructed response*: siswa mengkonstruksi sebuah respon, memberikan respon meluas, terlibat dalam kinerja, atau menciptakan sebuah produk.
2. *Higher-order Thinking*: siswa secara tipikal menggunakan pemikiran tingkat tinggi dalam mengkonstruksi respon terhadap pertanyaan terbuka.
3. *Authenticity*: tugas-tugas bermakna, menantang dan aktivitas pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang baik atau konteks dunia nyata lainnya dimana nantinya siswa diharapkan dapat melakukannya.
4. *Integrative*: tugas-tugas harus mengintegrasikan semua keterampilan, dan dalam beberapahal, menyangkut integrasi pengetahuan serta keterampilan-keterampilan lintasisi.
5. *Process and Product*: prosedur dan strategi yang dipergunakan untuk mencari dan mendapatkan jawaban yang benar atau untuk mengeksplorasi beragam solusi dari tugas-tugas yang kompleks sering dinilai dan begitu juga produknya yang berupa jawaban yang benar.

6. *Depth Versus Breadth*: memberikan informasi yang mendalam tentang keterampilan seorang siswa atau belajar tuntas (*mastery learning*) seperti dikontraskan dengan tes pilihan ganda dengan cakupan yang luas tetapi kurang dapat melatih keterampilan berfikir atau dayaana larting kattinggi.

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dapat menggunakan penilaian autentik. Hal ini dikarenakan penilaian autentik memiliki relevans ikuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain (Kemendikbud, 2013). Adapun jenis penilaian yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja
- b. Penilaian proyek
- c. Penilaian portofolio
- d. Penilaian tertulis

2.5.1.3 Penilaian Kinerja

Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja:

1. Daftar cek (*checklist*)

Digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan.

2. Catatan anekdot atau narasi (*anecdotal/narative records*)

Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Skala penilaian (*rating scale*)

Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numberik berikut predikatnya. Misal: 5 = baiksekali, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, 1 = kurangsekali.

4. Memori atau ingatan (*memory approach*)

Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah pesertadidik sudah berhasil atau belum. Cara seperti ini tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup dianjurkan.

2.5.1.4 Penilaian Proyek

Penilaian proyek (*project assessment*) merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh pesertadidik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh pesertadidik, mulaidari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Berikut ini tiga hal yang perludiperhatian guru dalam penilaian proyek:

1. Keterampilan pesertadidik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, member makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan.
2. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik.
3. Keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik.

2.5.1.5 Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bias berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi pesertadidik, dan di evaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikutini:

1. Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio.

2. Guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat.
3. Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran.
4. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya.
5. Guru menilai portofolio peserta didik dengan criteria tertentu.
6. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan.
7. Guru member umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio.

2.5.1.6 Penilaian Tertulis

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.

2.5.2 Tujuan Kurikulum 2013

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan perkembangan karena kurikulum digunakan sebagai

alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang selalu mengalami pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan perkembangan zaman. Untuk Kurikulum 2013 berdasarkan pada Permendikbud No. 67 Tahun 2013 hal. 4 menjelaskan bahwa, Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

2.5.3 Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, dalam rangka pengembangan Kurikulum 2013 pada tingkat nasional dilakukan penataan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP). Elemen perubahan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses, standarisasi, dan standar penilaian (Kemendikbud 2012). Seperti yang tertulis dalam Permendikbud No. 54 Tahun 2013, Standar kompetensi lulusan (SKL) dibedakan menjadi 3 domain yaitu domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Domain sikap terdiri dari elemen proses, individu, sosial, dan alam. Domain keterampilan terdiri dari elemen proses, abstrak, dan konkrit. Domain pengetahuan terdiri dari elemen proses, objek, dan subjek. Dalam Kurikulum 2013 kompetensi lulusan diarahkan pada peningkatan dan keseimbangan *soft skill* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan di tingkat SD. Menurut Permendikbud No. 64 Tahun 2013, standar isi kurikulum 2013 yakni lebih menekankan pada :

- a. Kedudukan matapelajaran yakni matapelajaran dikembangkan dari kompetensi, dimana setiap matapelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan).
- b. Pendekatan kompetensi yang dikembangkan melalui pendekatan tematik-integratif pada semua matapelajaran, wajib dan vokasi.
- c. Struktur kurikulum, dimana kegiatan pembelajaran bersifat holistik dan integrative berfokus pada alam, sosial dan budaya dengan menggunakan pendekatan *scientific* (sains), serta terdapat pengurangan matapelajaran dan penambahan jam pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan.

Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013, standar proses kurikulum 2013 lebih menekankan pada proses pembelajaran yang semula berfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sekarang dilengkapi dengan 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring), selain itu dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode *discovery learning*. Kegiatan pembelajaran nya tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Banyak menggunakan sumberbelajar, pembelajaran berbasis tematik-integratif, berbasis pendidikan sains (*scientific*), tidak adanya penjuruan awal, melainkan terdapat matapelajaran wajib, peminatan, antarminat, dan pendalaman minat (Kemendikbud, 2013). Sedangkan menurut Permendikbud No. 66 Tahun 2013, standar penilaian adalah criteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian berupa hasil belajar peserta didik.

Yang mana, penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian yang berbasis kompetensi melalui pendekatan penilaian otentik

(*authentic assesment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, hasil belajar secara utuh, penggunaan PAP (Penilaian Acuan Patokan) yakni penilaian yang didasarkan pada pencapaian skor terhadap skor ideal (maksimal) dan pemanfaatan portofolio sebagai instrument utama penilaian.

2.5.4 Buku Ajar Kurikulum 2013

Buku ajar dalam kurikulum 2013 merupakan buku pegangan yang disiapkan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Buku pegangan ini mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, yang mana oleh Pemerintah dijadikan sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah. Buku ajar Kurikulum 2013 dirumuskan berdasarkan pada konsep kurikulum dan Silabus. Dimana dalam buku siswa dan guru berisi matapelajaran yang dikembangkan dari kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan dan keterampilan), untuk mencapai kompetensi tersebut Pemerintah telah menyediakan 2 jenis buku pegangan yakni buku guru dan siswa yang berbasis kegiatan (*Activity Based Learning*) untuk SD yang ditulis secara terpadu (Tematik Terpadu). Buku pegangan Kurikulum 2013 ditekankan pada *activity-based* maksudnya pembelajaran yang berbasis aktivitas, dimana peserta didik dituntut untuk aktif dalam mencari sumber belajar lain yang tersedia di sekitarnya dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu atau *project* di setiap pertemuan. Penggunaan buku pedoman ini bukan sebagai buku baca dan hafalan siswa, melainkan lebih pada buku pengembangan *hard skill* dan *softskill*.

Buku guru memuat rencana pembelajaran yang berbasis aktivitas, didalamnya berisi rancangan urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Sedangkan bukusiswa berisi penjabaran usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan kata lain, buku guru dan buku siswa dibuat untuk memudahkan siswa dalam pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Melalui penggunaan buku ajar dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran untuk menyesuaikan dan meningkatkan daya serap peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang telah dikembangkan dan dikreasikan sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar (*relevan*). Dengan demikian, guru sebagai pengendali utama di dalam proses belajarmengajar di kelas perlu mencermati terlebih dahulu terhadap buku siswa maupun buku pegangan guru yang sudah disediakan Pemerintah. Mengingat buku yang disediakan oleh Pemerintah ditujukan untuk keperluan skala nasional. Sehingga perlunya analisis yang cermat dari guru sebelum menggunakan di kelas, untuk mengurangi ketidaksesuaian atau ketidaktepatan yang ada dalam bukuter sebut.

PenelitianTerdahulu

1. Penelitian dari Kuntarto, E., dan Destrinelli dengan Judul Kajian Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Calistung di SD Negeri Lawe Bekung. Penelitian Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Calistung di SD Negeri Lawe Bekung ini dilaksanakan menggunakan ancangan deskriptif kuantitatif,kualitatif. Sasaran penelitian adalah pemahaman guru

terhadap konsep dasar K-13 dan implementasi nya dalam kegiatan pembelajaran calistung. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan rata-rata guru SD Negeri Lawe Bekung terhadap K-13 untuk aspek umum 100%, (2) aspek Kerangka Dasar 49,12%, (3) aspek Buku Guru 51,87%, (4) aspek Buku Siswa 73,02%, (5) aspek Pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran saintifik 73,30%, dan (6) aspek Penilaian Otentik 100%. Implementasi K-13 pada pembelajaran calistung di SD Negeri Lawe Bekung menunjukkan bahwa RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi kriteria K-13. Pada aspek Kegiatan Pembelajaran, sebagian besar guru telah melaksanakan K-13 dalam pembelajaran calistung. Kelemahan aspek ini adalah guru kurang mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar dari alam sekitar dan guru cenderung mempertahankan kebiasaan mengajarkonvensional. Pada aspek Penilaian Autentik, sebagian besar guru tidak melaksanakan penilaian sikap dan penilaian proses. Dari hasil penelitian dikemukakan saran: diperlukan suatu sistem penguatan berupa pelatihan dan supervisi yang berkesinambungan agar implementasi K-13 berhasil maksimal. Pemangku kebijakan perlu mengkaji kembali system penilaian autentik. Pemangku kebijakan perlu memperhatikan ketersediaan sarana belajar. Kajian tentang implementasi K-13 perlu terus dilakukan sebagai bagian dari sarana evaluasi dan perbaikan.

1. Hasil Penelitian dari Eusabia Floreza Waybin dengan Judul Implementasi Kurikulum 2013 dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Lawe Bekung Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perencanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013; (2) mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SD Negeri Lawe Bekung; (3) mengetahui penilaian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/23

Access From repository:uma.ac.id)21/8/23

hasil belajar siswa berbasis Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung; (4) mengetahui hambatan yang dialami saat mengimplemetasikan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di SD Negeri Lawe Bekung; (5) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan saat mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di SD Negeri Lawe Bekung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan populasi, dengan responden 8 guru kelas kelompok matapelajaran program produktif di SD Negeri Lawe Bekung. Variabel penelitian ini adalah implementasi Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji validitasin strumen penelitian berdasarkan validasi logis dan validasi empiris. Uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data statistic deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) implementasi Kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran berada dalam katego rise bagianbesar terlaksana dengan mean 71,27; (2) hambatan yang terjadi adalah pembagian materi pembelajaran kedalam jam dan hariefektif sekolah yang masih rumit, belum ada nyasosialisasi Kurikulum 2013 untuk kelompok matapelajaran produktif, sebagian besar matapelajaran kelompok program produktif belum ada silabusnya; (3) upaya untuk mengatasinya adalah guru menyesuaikan waktu/jam dan materi yang relevan dengan kondisi di sekolah, melakukan konsultasi dengan Kaprodi, Sekjur, maupun dalam forum MGMP; (4) implementasi Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelajaran berada dalam kategori sebagian besar terlaksana dengan mean 46,78; (5) hambatan yang terjadi adalah pendekatan scientific

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

approach, project based learning, discovery learning masih sulit diterapkan, terbatasnya bahan ajar, dan kurangnya fasilitas sekolah; (6) upaya untuk mengatasinya adalah guru melakukan berbagai pendekatan pembelajaran agar tercipta suasana belajar aktif, memaksimalkan fasilitas KBM; (7) implementasi Kurikulum 2013 dalam penilaian hasil belajar siswa berada dalam kategori sebagian besar ter laksana dengan mean 47,41; (8) hambatan yang terjadi adalah keterbatasan waktu dalam mengamati setiap siswa, belum mengenal secara menyeluruh terhadap setiap siswa, siswa ada yang tidak mengikuti proses KBM; (9) upaya untuk mengatasinya adalah guru mengelompokkan siswa di setiap kegiatan pembelajaran dibantu dengan penilaian antar teman, serta penambahan tugas dan diadakannya kegiatan remedial. Kata kunci: implementasi, Kurikulum 2013, perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar siswa.

2.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi Peraturan Menteri No. 81a Wajib dilaksanakan di sekolah termasuk SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Tujuannya sangat bagus untuk mewujudkan sumber daya bangsa Indonesia yang berkualitas. Dalam penerapannya di SD Negeri Lawe Bekung belum sesuai dengan yang diharapkan, Berbagai permasalahan yang di hadapi diantaranya Belum semua Guru mampu melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar, ketiadaan buku referensi bagi guru maupun siswa di sekolah juga menjadi permasalahan besar, selain itu ketidak layakan sejumlah peralatan penunjang pelaksanaan pembelajaran. Berkaitan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

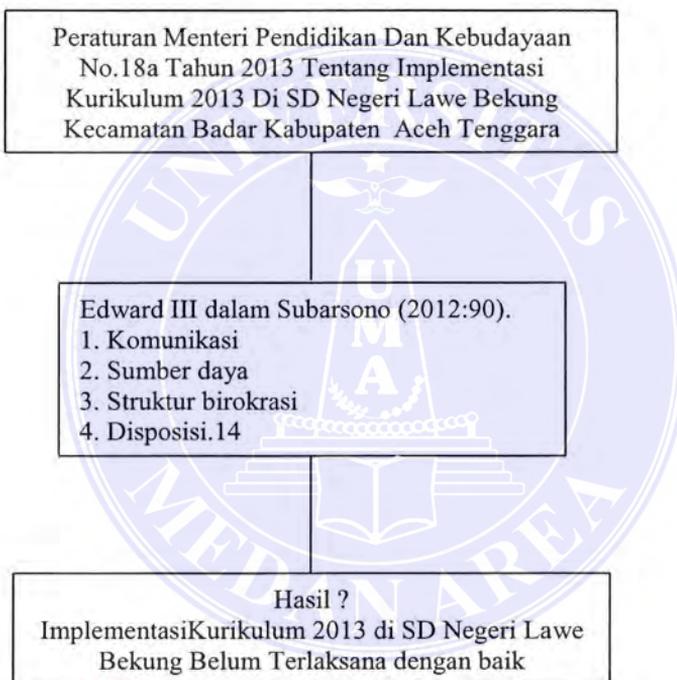
Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

permasalahan ini maka perlu diuji melalui penelitian dengan Alat Analisa menggunakan Teori dari Edward III

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.2

Skema Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis karakteristik populasi atau bidang-bidang tertentu secara factual dan cermat tanpa mencari atau menjelaskan suatu hubungan (Sugiyono, 2012:27).

Metode deskriptif mengukur frekuensi atau durasi tentang pola-pola tertentu dari perilaku atau peristiwa. Studi deskriptif harus kemudian mengukur fenomena tersebut dalam satu cara kualitatif (Silalahi, 2015:131).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara . waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2020 – Februari 2020.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapya dan relevan dengan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From repository.uma.ac.id 21/8/23

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Komite Sekolah
2. Dewan Guru

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu:
 - a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Peneliti melakukan wawancara secaramen dalam (indepht interview) dengan narasumber (keyinforman) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya yaitu,:
 - b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu:
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakancatatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karyailmiah, pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2012: 335) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2010: 4).

Untuk data hasil wawancara dilakukan analisis data berdasarkan tiga komponen yaitu:

3.5.1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

3.5.2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi operasional variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Maka dalam hal ini, penulis mengemukakan definisi dari konsep yang dipergunakan, yaitu: standar pelayanan prosedur perkawinan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan prosedur perkawinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pada penelitian ini definisi operasional mengacu kepada teori Implementasi dari George Edward III, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah proses untuk menyampaikan keputusan-keputusan dan perintah-perintah kepada personil-personil yang tepat untuk melaksanakannya, mencakup :
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan perintah
 - c. Konsistensi perintah 44
2. Sumberdaya adalah ketersediaan berbagai sumberdaya meliputi sumberdaya manusia dan finansial untuk mendukung implementasi kebijakan, mencakup :

- b. Sistem informasi
 - c. Program pelatihan pegawai
 - d. Ketersediaannya
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, mencakup:
- a. Tanggung jawab implementor
 - b. Komitmen bersama-sama
 - c. Kesadaran atas pentingnya implementasi kebijakan.
4. Struktur birokrasi adalah merujuk pada struktur organisasi dan *standard operational procedure* (SOP) pada unit organisasi, mencakup:
- a. Pembagian tugas
 - b. Koordinasi
 - c. Prosedur

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut:
 - a. Komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas diutamakan dalam pembentukan kompetensi dan karakter. Salah satu strategi belajar dikelas adalah pemilihan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Materi pembelajaran merupakan semua sumber belajar yang apabila digunakan secara tepat, dapat membantu guru merubah perilaku peserta didik sesuai karakter dan sasaran yang diharapkan. Tingkat keberhasilan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, maka guru-guru melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui sejauh mana tingkat, pemahaman, pengetahuan, dan penguasaan (pencapaian kompetensi) peserta didik terhadap materi pembelajaran.
 - b. Sumber daya di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, guru secara mandiri mengikuti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penataran, seminar, atau diskusi. Dengan adanya guru yang aktif

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengikuti penataran, seminar, atau diskusi, akan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan guru dalam implementasi kurikulum 2013. Sumber daya di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dapat bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan mutu dan sarana prasarana di sekolah tersebut. Pengawasan kerja sama setiap sumber daya manusia terhadap sarana dan prasarana merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan baik demi keberhasilan proses pembelajaran.

- c. Disposisi atau sikap pelaksana di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara memperhatikan beberapa hal yaitu prinsip relevansi, prinsi pefektivitas, prinsi pefisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, dan prinsip yang berorientasi pada tujuan.
- d. Struktur birokrasi di SD Negeri Lawe Bekung Badar Kabupaten Aceh Tenggara berusaha secara terbuka untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan kompetensiswa. Dalam hal hubungan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dengan melakukan kerjasama. Dalam hal hubungan kerjasama, SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan kerjasama dengan menjaga mutu siswa SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu landasan pengembangan kurikulum di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan

Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi landasan filosofis

pancasila, landasan psikologis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan agama dan landasan perkembangan IPTEK.

2. Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka didapat apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Fasilitas dan sumber belajar tersebut perlu didayagunakan seoptimal mungkin, dipelihara, dan disimpan dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2013 : 49). Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyasa bahwa pentingnya fasilitas dan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sendiri, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mengalami kendala dalam pengadaan buku mata pelajaran. Walau sebagian sudah memiliki buku tetapi ada beberapa buku kurikulum 2013 yang belum di datangkan dari Kementerian atau Bupati.

b. Peserta Didik

Peneliti melihat bahwa untuk pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, kurang maksimal di karenakan dalam satu pertemuan guru harus melakukan evaluasi kepada peserta didiknya. Kendala untuk peserta

UNIVERSITAS MEDAN AREA
sindik di h a r e a
kemampuan peserta didik dalam menangkap materi

Document Accepted 21/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

oleh guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan masing-masing peserta didik dalam belajar mengajar memang berbeda-beda.

c. Guru

Guru juga terhambat dalam pengadaan buku paket untuk proses belajar mengajar guru. Tidak adanya buku pegangan guru untuk melaksanakan pembelajaran atau materi yang akan di sampaikan oleh peserta didik menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum 2013. Dalam pelatihan dan sosialisasi kurikulum 2013 kepada guru harus di tingkatkan kembali. Mengingat bahwa guru adalah kunci sukses keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan pendidikan, dan untuk menumbuhkan kreativitas terhadap guru yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kurikulum 2013.

5.2 Saran

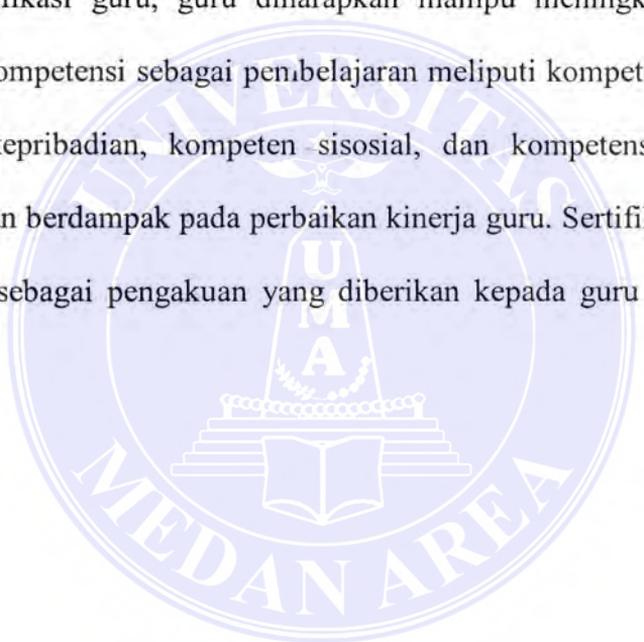
Untuk itu ada beberapa saran dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Lawe Bekung Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah bisa terus berupaya mencari alternative dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru yang berujung pada hasil akhir yaitu mutu pendidikan nasional. Terobosan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA meningkatkan kompetensi dan sertifikasi guru. Selain itu dalam

upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pemerintah juga harus melakukan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

- b. Melalui program peningkatan kualitas kinerja guru tersebut terutama terhadap program sertifikasi guru, guru diharapkan mampu meningkatkan terhadap penguasaan kompetensi sebagai penbelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompeten sisosial, dan kompetensi professional. Semua itu akan berdampak pada perbaikan kinerja guru. Sertifikasi merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alma, Buchari. 2009. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universal Press.
- Depdiknas. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2006. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta.
- Dinding Nurdin, Imam Sibaweh. 2015. *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- E. Mulyasa. 2010. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountor, D. M. S, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*: PPM.
- Laga, Timor F. 2014. *Kinerja Guru Profesional Sekolah Dasar Di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mulyasa, E. 2013. *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyana, Dedy. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)21/8/23

- Mangkunegara, Anwar. 2007. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Suprayekti, Fathia Fairuza. 2015. *Evaluasi Program*. Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rineka. 2006. *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: Depdiknas Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Suharsimi Arikunto, Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, Wina. 2005. *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, Dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung.
- Usman, H. 2006. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. 2007. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. 2008. Bandung: Remaja Rosdakarya Samani.

MucLas. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru Di Indonesia*. Surabaya: SIC.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
<http://media.indonesia.com>.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Non Buku:

<http://Implementasi Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Al Hikmah Surabaya | M Fachruddin Latief - Academia.edu>. (di akses pada tanggal 21 Februari 2020. 15:45 WIB)

<https://www.google.co.id/search?dcr=0&ei=5bBcWsaaDcPc0ASM-gBg&qimplementasi+kinerja+guru+dalam+peningkatan>. (di akses pada tanggal 3 Maret 2020. 11:55 WIB)

<https://media.neliti.com/media/publications/74066-ID-efektivitas-pendidikan-dan-pelatihan-dal.pdf>. (di akses pada tanggal 17 Februari 2020. 16:06 WIB)